

Laporan Akhir

KAJIAN PERAN PEREMPUAN DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI KEGIATAN INDUSTRI RUMAHAN



STAF AHLI BIDANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Disusun oleh:
PT Bermitra Inovatif Sistem Andalan



Didukung:
CENTER FOR SYSTEM

JAKARTA, AGUSTUS 2016

RINGKASAN EKSEKUTIF

Strategi pemberdayaan perempuan memprioritaskan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) melalui penguatan Industri Rumahan dan wirausaha perempuan sehingga menjadi bagian upaya penanggulangan kemiskinan, perdagangan (*trafficking*) Orang termasuk anak dan perempuan, serta kekerasan, dan ujungnya meningkatkan indeks ketahanan keluarga.

Kemiskinan dan kurangnya kesempatan pendidikan dan ekonomi di kampung halaman seseorang dapat menyebabkan perempuan untuk secara sukarela bermigrasi dan kemudian tanpa sadar diperdagangkan menjadi pekerja seks. Kecenderungan tersebut diperkirakan karena berbagai data yang mendukung. Data Sakernas (2011) memberikan Perempuan yang bekerja di sektor formal baru memberikan peluang kerja bagi perempuan 57,89% dari penduduk perempuan yang berjumlah 120.948.310 (49,63% dari penduduk Indonesia). Perempuan pengangguran terbuka: 4%, perempuan yang bekerja di sektor formal: 42,11%.

Kebijakan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) sebagai landasan terdekat dalam Pembangunan Industri Rumahan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Perempuan menjadi dasar terungkapnya bahwa IR yang dilakukan kaum perempuan dapat menyerap tenaga kerja, baik dari keluarga sendiri maupun tenaga kerja sekeliling rumah, seperti tetangganya. Hasil kajian yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) bersama Institut Pertanian Bogor (2011) membuktikan bahwa IR dapat membantu peningkatan kesejahteraan keluarga, menyerap dan menciptakan tenaga kerja, dan mengurangi keinginan tenaga kerja untuk migrasi menjadi tenaga kerja informal di luar negeri yang kerap kali menjadi sasaran perdagangan orang.

Hasil studi ini menemukan betapa pentingnya peran Badan Pemberdayaan Perempuan di daerah dalam setiap kegiatan pengentasan kemiskinan terutama yang berdampak terhadap kesehatan ibu dan anak, serta gizi buruk yang sering dijumpai di daerah tertinggal. Sedangkan di tingkat pusat, studi ini telah mengidentifikasi adanya kesenjangan kebijakan penanggulangan kemiskinan karena belum diterapkan secara efektif strategi **Pembangunan Responsif Gender**

(PRG). Karena perempuan lebih dipandang sebagai objek pembangunandan belum sebagai subjek pembangunan yang berarti terutama di bidang ekonomi.

KPPPA berkewajiban untuk berperan aktif dan tindak nyata pada kegiatan pengentasan kemiskinan serta pemerataan pembangunan, melalui pemberdayaan **wirausaha perempuan** serta perkuatan **Industri Rumahan** dalam kerangka Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan (PPEP). Industri rumahan berpotensi besar untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional karena sebagai suatu sistem produksi bisa meningkatkan nilai tambah dari sumber daya lokal dalam skala usaha mikro yang tersebar diseluruh pelosok nusantara, baik diperkotaan maupun di pedesaan.

KPPPA seyogyanya berada pada struktur koordinatif dan sinergi aksi penanggulangan kemiskinan baik di pusat maupun daerah, yang mencakup perumusan kebijakan sampai pada program aksi yang dapat diukur dampaknya pada indeks ketahanan keluarga serta peningkatan pendapatan daerah setempat.

Adapun saran dari hasil kajian ini antara lain: segera mengintegrasikan aparat dan program kerja KPPPA pada upaya bersama pengentasan kemiskinan dalam wadah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang ditetapkan melalui **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010** tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan perubahannya No. 96 Tahun 2015. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dalam rencana strategis yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup keluarga, maka kegiatan **SMBD Industri Rumahan** merupakan upaya untuk mewujudkan misi tersebut. Adapun kualitas hidup keluarga meliputi kecukupan pangan, kesinambungan pendapatan, kesehatan ibu dan anak, pendidikan formal dan informal serta rumah yang sehat dan bebas limbah, dan KPPPA mengatur struktur birokrasi dan Prosedur Operasional Baku pada Deputi yang terkait, sehingga dapat membuahakan **hasil nyata dan terukur** dari gerakan penanggulangan kemiskinan di daerah tertinggal, terpencil, dan terluar.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur alhamdulillah selalu kami panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan berkah-Nya maka laporan akhir yang berjudul **“KAJIAN PERAN PEREMPUAN DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI KEGIATAN INDUSTRI RUMAHAN”** dapat diselesaikan. Diharapkan laporan ini dapat memberikan masukan dalam perbaikan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kementerian PP dan PA ataupun pada lembaga mitra KPPPA.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan khusus kepada Staf Ahli Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, atas kepercayaan dan kerjasamanya yang baik dalam pelaksanaan kegiatan ini sesuai dengan nota kesepakatan bersama nomor 12/MoU/PPK-Roren/SAM/2016. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah memberikan ijin dan dukungannya kepada tim untuk melakukan kajian. Kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan ini, kami sampaikan terima kasih, semoga sumbangsih tenaga dan pemikiran kita semua memberikan manfaat dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Semoga hasil kajian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pengambil kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Jakarta, Agustus 2016

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	v
I. PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUJUAN KEGIATAN	4
C. HASIL YANG DIHARAPKAN	5
D. RUANG LINGKUP	5
II. PENDEKATAN SISTEM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	6
III. UPAYA PENINGKATAN EKONOMI KELUARGA	10
A. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI PEREMPUAN (PPEP)	10
B. PPEP BERBASIS INDUSTRI RUMAHAN	12
IV. INDUSTRI RUMAHAN PENGGERAK PPEP	14
V. UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN	20
A. MATRA PENGEMBANGAN BISNIS	20
B. MATRA KETENAGAKERJAAN	22
C. MATRA KELEMBAGAAN	25
D. MATRA PEMBIAYAAN USAHA	28
E. MATRA INFRASTRUKTUR	30
VI. KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN	33
A. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TNP2K)	33
B. PERAN SERTA KPPPA PADA PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN	35
VII. KESIMPULAN DAN SARAN	40
DAFTAR PUSTAKA	42

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Angka Kemiskinan Tertinggi di Indonesia	5
Tabel 2. Analisa Kebutuhan Para Pihak	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Perkembangan Rasio Gini di Indonesia Lima Tahun Terakhir	2
Gambar 2. Diagram Input Output Sistem Pemberdayaan Perempuan	6
Gambar 3. Keterkaitan PPEP dalam pengembangan Model Desa PRIMA	11
Gambar 4. Diagram Input-Output PPEP	12
Gambar 5. Susunan Keanggotaan TNP2K	34
Gambar 6. Rich Picture Peran Serta KPPPA pada Program Penanggulangan Kemiskinan	37
Gambar 7. PAM Peranan KPPPA dalam Penanggulangan Kemiskinan	39

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

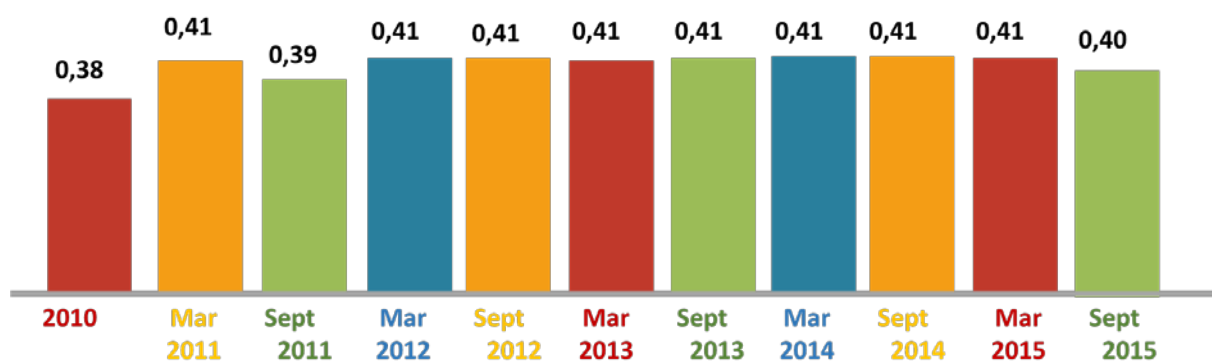
Upaya penanggulangan kemiskinan tetap menjadi salah satu tantangan mendesak bagi Indonesia. Meskipun angka kemiskinan nasional secara umum telah turun ke tingkat sebelum krisis—dengan tidak memperhitungkan kenaikan angka kemiskinan yang baru saja terjadi, hampir 35 juta penduduk masih hidup dalam kemiskinan. Jumlah ini masih melebihi total jumlah penduduk miskin di seluruh Asia Timur, tidak termasuk China. Selain itu, angka kemiskinan nasional ini menutupi gambaran tentang kelompok besar penduduk ‘hampir-miskin’ di Indonesia, yang hidupnya mendekati garis kemiskinan. Sekitar 40 persen dari jumlah penduduk keseluruhan, atau mendekati 90 juta penduduk, hidup dengan penghasilan antara 1 dan 2 dollar AS per hari. Sesungguhnya, meskipun Indonesia sekarang merupakan negara berpenghasilan menengah, jumlah penduduknya yang hidup dengan penghasilan kurang dari 2 dollar AS per hari sama besar dengan jumlah penduduk miskin di negara-negara berpenghasilan terendah di wilayah Asia Timur. Sangat rentannya kelompok penduduk hampir-miskin ini lagi-lagi dibuktikan dengan meningkatnya angka kemiskinan yang dipicu oleh kenaikan harga beras pada tahun 2006, yang mengakibatkan angka kemiskinan meningkat dari 16,0 persen menjadi 17,7 persen.

Indonesia juga mengalami kemajuan yang sangat lamban dalam beberapa aspek penting kemiskinan lainnya selain penghasilan. Angka kematian ibu hamil, angka partisipasi siswa sekolah menengah tingkat pertama dan angka gizi buruk, misalnya, belum juga membaik dengan cukup cepat dan masih tergolong tinggi bila dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasanannya. Indonesia juga ditandai dengan tingginya kesenjangan dan ketimpangan antarwilayah. Masih ada beberapa wilayah Indonesia di mana tingkat dan karakteristik kemiskinan lebih mirip dengan sebagian negara berpenghasilan terendah di dunia, serta masih adanya kantong-kantong kemiskinan bahkan di wilayah-wilayah Indonesia yang lebih makmur.

Perkembangan lebih lanjut dalam penanggulan kemiskinan dalam era pembangunan Kabinet Kerja diperoleh dari BPS pada bulan Maret 2015. Dilaporkan jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,59 juta orang (11,22 persen),

bertambah sebesar 0,86 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2014 yang sebesar 27,73 juta orang (10,96 persen). Sementara persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2014 sebesar 8,16 persen, naik menjadi 8,29 persen pada Maret 2015. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan naik dari 13,76 persen pada September 2014 menjadi 14,21 persen pada Maret 2015.

Koefisien GINI, yang mengukur ketimpangan distribusi pendapatan, menunjukkan tren penurunan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Sebuah koefisien 0 menunjukkan kesetaraan yang sempurna, sedangkan koefisien 1 menunjukkan ketimpangan sempurna. Rasio Gini periode September 2015 turun 0,01 poin menjadi 0,40 dibandingkan Maret 2015 yang sebesar 0,41. BPS menyebutkan, ini menunjukkan turunnya ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia.



Gambar 1. Perkembangan Rasio Gini di Indonesia Lima Tahun Terakhir

Menurut AVS Hubeis dan Mulyandari (2010), inklusif gender dan kemiskinan, merupakan nilai yang diperjuangkan oleh berbagai lembaga yang memberi perhatian khusus pada isu gender, di antaranya adalah Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS) dan menjadi pegangan di dalam melaksanakan program. Untuk itu ACCESS mencoba mengembangkan kebijakan, strategi dan teknik-teknik yang bisa digunakan untuk mendorong agar nilai *Gender and Poverty Inclusive* (GPI) bisa diterapkan dan mewarnai semua aktivitas, dengan menggunakan proses-proses yang partisipatif.

Dalam kajiannya yang berjudul Analisis Teori Performance dan Positioning dalam Komunikasi Pembangunan Berwawasan Gender, AVS Hubeis dan Mulyandari

menyatakan bahwa perempuan miskin lebih menderita daripada laki-laki miskin dan lebih menderita daripada sesama perempuan yang berasal dari kelas ekonomi yang lebih baik. adalah beberapa kondisi umum yang harus dihadapi orang miskin yaitu kekurangan pangan, penghasilan yang minim, penyakit yang tidak diobati karena masalah biaya dan akses ke fasilitas kesehatan, gizi buruk, rumah yang tidak sehat, lingkungan yang buruk dan sulitnya persediaan air bersih. Kondisi ini memaksa orang miskin untuk menghabiskan waktu dan tenaganya untuk memenuhi kebutuhan dasar supaya bisa bertahan hidup. Pendidikan yang rendah atau bahkan buta huruf semakin membatasi untuk mengakses informasi.

Hal ini sejalan dengan yang ditemukan oleh Birdshal dan McGreevey (1983) yang menyatakan fakta bahwa beban perempuan miskin lebih besar karena peran ganda yaitu sebagai pengurus rumah tangga sekaligus pencari nafkah untuk keluarga. Perempuan bertanggung jawab untuk mengurus anak-anak, menyiapkan makanan, mengambil air dan kayu bakar, mencuci baju, membersihkan rumah, mengatur keuangan rumah tangga, yang menyerap sebagian besar waktu mereka. Namun, pekerjaan ini sering tidak dianggap sebagai sebuah “pekerjaan”, sehingga juga tidak diperhitungkan dalam “produksi” sebuah rumah tangga. Hal ini diperburuk lagi dengan adanya anggapan bahwa penghasilan perempuan hanya sebagai “tambahan” penghasilan suami.

Terdapat keterkaitan antara perempuan dengan kondisi kemiskinan, dimana budaya patriarki secara tidak langsung telah memberikan batasan-batasan bagi perempuan dan ketidakadilan serta ketidaksetaraan turut melahirkan kedekatan identitas perempuan dengan kemiskinan. pengalaman perempuan dan laki-laki berbeda terhadap kemiskinan, dan perempuan dibandingkan laki-laki jauh lebih tertinggal dalam mengakses sumberdaya ekonomi sebagai pintu dalam penghapusan berbagai ketidakadilan dalam masyarakat. Upaya tersebut mrngisyaratkan bahwa penurunan angka kemiskinan harus bisa mendorong peningkatan partisipasi dan kesejahteraan perempuan. Apabila perempuan tidak dijadikan target sasaran pengentasan kemiskinan dan analisis gender tidak digunakan untuk melihat akar penyebab kemiskinan, maka program-program pengentasan kemiskinan tidak akan bisa menjangkau kebanyakan perempuan yang memiliki keterbatasan akses terhadap ruang publik.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) adalah Kementerian yang menjadi penanggung jawab Pembangunan melalui tugas dan fungsi sebagai penyelenggara negara. KPPPA adalah kementerian Non portofolio berdasarkan Peraturan Presiden No. 59 tahun 2015, yang juga memuat ketentuan untuk melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, perlindungan anak, tumbuh kembang anak, dan partisipasi masyarakat serta koordinasi pelaksanaan penanganan perlindungan perempuan dan anak berbasis gender. Hal ini dapat dimaknai bahwa Kpppa dapat mengembangkan dan memvalidasi sebuah kebijakan dalam bentuk model atau prototype serta memfasilitasi dalam rangka kontribusi dan synerginya dengan Kementerian maupun SKPD terkait agar kebijakan yang dirumuskan dapat berjalan dalam sistem implementasinya di masyarakat.

KPPPA telah melakukan berbagai kajian tentang aktivitas program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pada berbagai program sektoral yang ternyata lebih mengandalkan kepada aktivitas perempuan dalam meningkatkan nilai tambah melalui kegiatan hilirisasi hasil sampai pada tingkat pemasaran dari industri rumahan. Melalui industri rumahan yang melibatkan partisipasi perempuan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan keluarga dan memperluas lapangan pekerjaan.

B. TUJUAN KEGIATAN

Tujuan umum adalah identifikasi dan analisis peran perempuan dalam penanggulangan kemiskinan melalui kegiatan industri rumahan, dengan studi kasus di propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin. Tujuan khusus kajian ini adalah :

1. Pemetaan industri rumahan untuk peningkatan pendapatan keluarga terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan di daerah.
2. Analisis peran wirausaha perempuan dalam memperluas lapangan pekerjaan melalui aktivitas industri rumahan.
3. Merekomendasikan pola dan mekanisme partisipatif masyarakat dalam pemberdayaan perempuan untuk pengembangan industri rumahan.

C. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Peta potensi dan aktivitas wirausaha perempuan dalam menanggulangi kemiskinan melalui industri rumahan;
2. Rumusan model pemberdayaan perempuan melalui industri rumahan dalam penanggulangan kemiskinan.

D. RUANG LINGKUP

Menurut data yang diolah dari Laporan Sosial Ekonomi BPS pada bulan Januari 2016 menunjukkan 10 provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi di Indonesia yaitu:

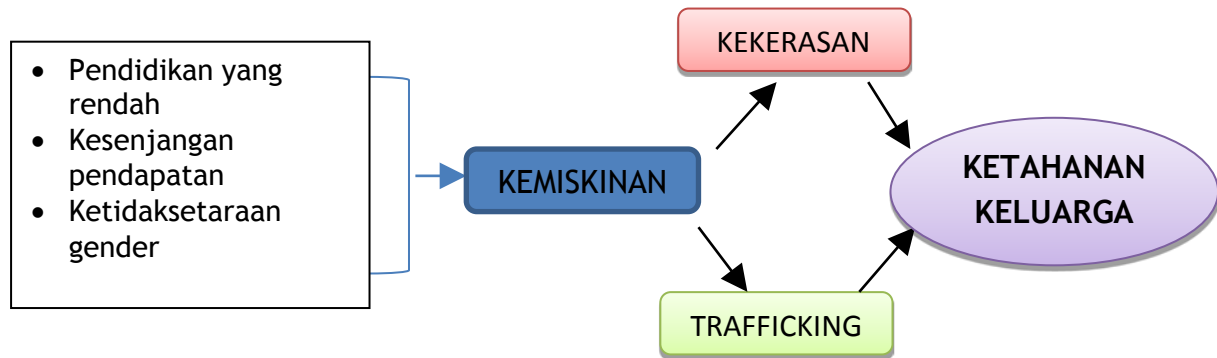
Tabel 1. Angka Kemiskinan Tertinggi di Indonesia

No	Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin (000 orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)
1	Papua	898,21	28,40
2	Papua Barat	225,54	25,73
3	Nusa Tenggara Timur	1160,53	22,58
4	Maluku	327,77	19,36
5	Gorontalo	206,52	18,16
6	Bengkulu	322,83	17,16
7	Aceh	859,41	17,11
8	Nusa Tenggara Barat	802,29	16,54
9	Sulawesi Tengah	406,34	14,07
10	Sumatera Selatan	1112,53	13,77

Dengan mempertimbangkan data tersebut diatas maka studi kasus pada kajian ini yaitu Sumatera Selatan Kabupaten Musi Banyuasin. Kajian akan dikhususkan pada industri rumahan pangan dan industri kreatif.

II. PENDEKATAN SISTEM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Sistem pemberdayaan perempuan terkait erat dengan persoalan kemiskinan, kekerasan rumah tangga, *trafficking*, dan ketahanan keluarga.



Gambar 2. Diagram Input Output Sistem Pemberdayaan Perempuan

Strategi pemberdayaan perempuan memprioritaskan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) melalui penguatan Industri Rumahan dan wirausaha perempuan sehingga menjadi bagian upaya penanggulangan kemiskinan, perdagangan anak dan perempuan (*trafficking*) kekerasan, dan ujungnya meningkatkan indeks ketahanan keluarga.

Kemiskinan dan kurangnya kesempatan pendidikan dan ekonomi di kampung halaman seseorang dapat menyebabkan perempuan untuk secara sukarela bermigrasi dan kemudian tanpa sadar diperdagangkan menjadi pekerja seks. Kecenderungan tersebut diperkirakan karena berbagai data yang mendukung. Data Sakernas (2011) memberikan Perempuan yang bekerja di sektor formal baru memberikan peluang kerja bagi perempuan 57,89% dari penduduk perempuan yang berjumlah 120.948.310 (49,63% dari penduduk Indonesia). Perempuan pengangguran terbuka: 4%, perempuan yang bekerja di sektor formal: 42,11%.

Globalisasi membuka perbatasan nasional untuk bermigrasi nya tenaga kerja juga meningkat Dampak ekonomi dari globalisasi mendorong orang untuk membuat keputusan sadar untuk bermigrasi dan menjadi rentan terhadap perdagangan. Ketidaksetaraan gender yang menghambat perempuan berpartisipasi di sektor formal juga mendorong perempuan ke sektor informal.

Upaya pengembangan ketenagakerjaan perempuan di sektor informal dapat dilakukan dalam berbagai cara diantaranya adalah:

1. Dalam rangka mewujudkan upaya pemberdayaan ekonomi informal termasuk di kalangan perempuan kepala rumah tangga diperlukan Arah Kebijakan Pengarusutamaan Gender di sektor informal (di bidang ekonomi informal) dengan melakukan up scaling untuk perluasan prototype berbagai keberhasilan (*best practices*). Upaya perluasan keberhasilan prototype dari design yang ada perlu dikembangkan. Sebagai contoh 149.793 unit koperasi yang tercatat di Indonesia, baru sekitar 2,3% yang dikelola oleh perempuan, padahal presentase perempuan pengusaha di sektor UMKM lebih besar jumlahnya. Inisiatif dan contoh fakta ini seyogyanya dilihat sebagai peluang untuk meningkatkan kinerja program-program pemberdayaan perempuan dalam pembangunan ekonomi nasional secara lebih adil dan merata.
2. Upaya perluasan keberhasilan prototype dari disain yang ada perlu dikembangkan dan dibuktikan keberhasilannya di lapangan sebagai disain implementasi kebijakan menyempurnakan atau melanjutkan kegiatan-kegiatan Pemberdayaan Perempuan di bidang Ekonomi seperti P2WKSS, PPEP, UP2K, UPPKS. Sebagai contoh 149.793 unit koperasi yang tercatat di Indonesia, baru sekitar 2,3% yang dikelola oleh perempuan, padahal presentasi perempuan pengusaha disektor UMKM lebih bersar jumlahnya. Inisiatif dan contoh fakta ini seyogyanya dilihat sebagai peluang untuk meningkatkan kinerja program-program pemberdayaan perempuan dalam pembangunan ekonomi nasional secara lebih adil dan merata.
3. KPPPA telah dapat mempromosikan pemberdayaan perempuan dan keluarga di bidang ekonomi, khususnya melalui pengembangan industri rumahan, dengan mekanisme yang berbeda juga telah mempromosikan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi melalui konsep desa prima atau Perempuan desa maju mandiri. Berbagai kegiatan lain sejenis sebagai bentuk kepekaan Kementerian dan lembaga dalam mengintegrasikan isu gender dalam tugas fungsinya yang juga mengakomodasikan pula aspirasi ekonomi non formal, termasuk kepala rumah tangga perempuan. Dalam konteks PUG, promosi ini dapat dilakukan sebagai bentuk konkrit dari analisis gender secara nasional khususnya di bidang ekonomi. Dengan demikian KPPPA telah berkontribusi dalam pengembangan kebijakan nasional yang ditujukan khusus untuk pemberdayaan perempuan dan keluarga di bidang ekonomi.

4. Dalam perspektif penguatan ketahanan keluarga promosi ini sudah dapat dilakukan karena penguatan komponen ekonomi dalam ketahanan keluarga merupakan bagian yang penting. Dasar hukumnya, yaitu Peraturan Menteri tentang pembangunan keluarga sudah ada. KPPPA bisa memasukan promosi usaha mikro sebagai bagian dari advokasi ke pemerintah daerah.
5. KPPPA sebagai Kementerian yang tugas fungsi utamanya merumuskan kebijakan, telah berhasil mengembangkan kebijakan yang berpihak kepada upaya mewujudkan pembangunan berkeadilan terutama kepada kelompok masyarakat miskin termajinalkan termasuk perempuan, namun belum dapat memenuhi harapan berbagai kalangan masyarakat di berbagai wilayah terhadap konsep Pemberdayaan Ekonomi perempuan. Di sisi lain sebagai subsistem dari sistem mesin pembangunan, di bidang ekonomi, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait, menuntut KPPPA memberikan kontribusi yang lebih besar, agar eksistensi sebagai subsistem pemerintah memang strategis dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Hasil evaluasi telah dapat mengidentifikasi berbagai upaya pengembangan kebijakan dalam program dan kegiatan yang masih belum dikembangkan kearah implementasi secara sinergi dan terkoordinasi antar Kementerian lembaga. Padahal di setiap wilayah tertentu memerlukan fokus program dan kegiatan yang harus dilakukan oleh antar kementerian lembaga dan memerlukan penyelarasan agar efektif dalam pencapaian target sasaran yang mempertimbangkan kesetaraan peran gender dan pemberdayaan perempuan melalui program-program bidang prioritas masing-masing Kementerian lembaga ataupun yang bersifat lintas bidang antara lain:

1. Dalam rangka mengurangi kemiskinan dan pengangguran dari makin meningkatnya jumlah angkatan kerja khususnya perempuan yang disebabkan antara lain (1) tingkat pertumbuhan penduduk yang relative tinggi, (2) jumlah penduduk yang memang sangat besar dengan tingkat pendidikan yang terbatas, (3) struktur umur yang mudah lebih besar, dan (4) penyebaran penduduk yang tidak merata, maka pentingnya kebijakan pengembangan ekonomi informal yang responsif gender dengan sasaran kantong-kantong kemiskinan baik di perkotaan maupun perdesaan.

2. Pentingnya pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran yang responsive gender di berbagai program dalam mengembangkan kewirausahaan dikalangan perempuan baik di pedesaan maupun perkotaan untuk mengembangkan ekonomi informal menjadi usaha mikro dalam rangka meningkatkan daya tahan ekonomi keluarga.
3. Dikembangkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data dalam rangka memenuhi upaya peningkatan aksesibilitas perempuan usaha ekonomi informal dalam permodalan. Data ini ternyata menjadi kebutuhan bagi partisipasi dunia perbankan dan non perbankan serta dunia usaha dalam rangka kemitraan dengan swasta untuk perluasan skala usaha dan pasar.
4. Perlunya KPPPA mendorong Peraturan Pemerintah di sektor ketenagakerjaan maupun peraturan pelaksanaan dari Undang-undang ketenagakerjaan sesuai pembangunan responsif gender untuk menciptakan kesempatan kerja yang baik (*decent work*), yaitu lapangan kerja produktif bagi tenaga kerja informal serta adanya perlindungan dan jaminan sosial yang memadai.
5. KPPPA perlu mendorong terus pengembangan kebijakan nasional untuk penguatan usaha mikro bahwa Industri Rumahan baik dalam konteks pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, khususnya mendorong agar ekonomi informal terutama yang dilakukan oleh perempuan dapat berkembang menjadi usaha mikro yang makin mandiri menjadi target pembangunan nasional yang terukur. Diharapkan upaya yang akan dikembangkan pada RPJMN selanjutnya mempunyai arah yang jelas untuk peningkatan kemampuan usaha mikro mengatasi berbagai kendala di bidang tenaga kerja informal termasuk mengatasi permasalahan *putting out system* di sekitar kawasan industri serta mengurangi kemiskinan dikalangan kepala rumah tangga perempuan.

Perlunya menambah tugas fungsi baru Kementerian PP dan PA terutama dalam mengemban dan mengakselerasi program pengentasan kemiskinan melalui inisiasi operasional di lapangan berupa pengembangan program pemberdayaan masyarakatan yang responsif gender yang fokus terhadap ekonomi informal yang berdampak terhadap peningkatan kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak perempuan, sehingga eksistensi sebagai subsistem mesin pembangunan memang di nilai strategis dalam meningkatkan kualitas pembangunan.

III. UPAYA PENINGKATAN EKONOMI KELUARGA

A. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI PEREMPUAN (PPEP)

Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) adalah program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang sangat strategis dalam upaya peningkatan kualitas hidup dan pemenuhan hak ekonomi perempuan melalui penguatan produktivitas ekonomi perempuan dalam rangka mengurangi beban biaya kesehatan dan pendidikan keluarga miskin.

PPEP merupakan upaya mendesak guna mewujudkan pemenuhan Hak Ekonomi Perempuan. Dalam kondisi perekonomian nasional yang belum kondusif, peran perempuan menjadi sangat penting dalam mendukung ekonomi keluarga. PPEP dimaksudkan untuk mendapatkan akses dan peluang pasar agar mampu bersaing dengan usaha-usaha lainnya. Pemenuhan hak ekonomi perempuan semakin dirasakan sebagai salah satu kebutuhan dasar yang mampu mengantarkan kaum perempuan pada suatu tatanan perjuangan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Dalam posisi kesejahteraan ekonomi yang layak, maka posisi tawar perempuan dalam keluarga pun semakin meningkat.

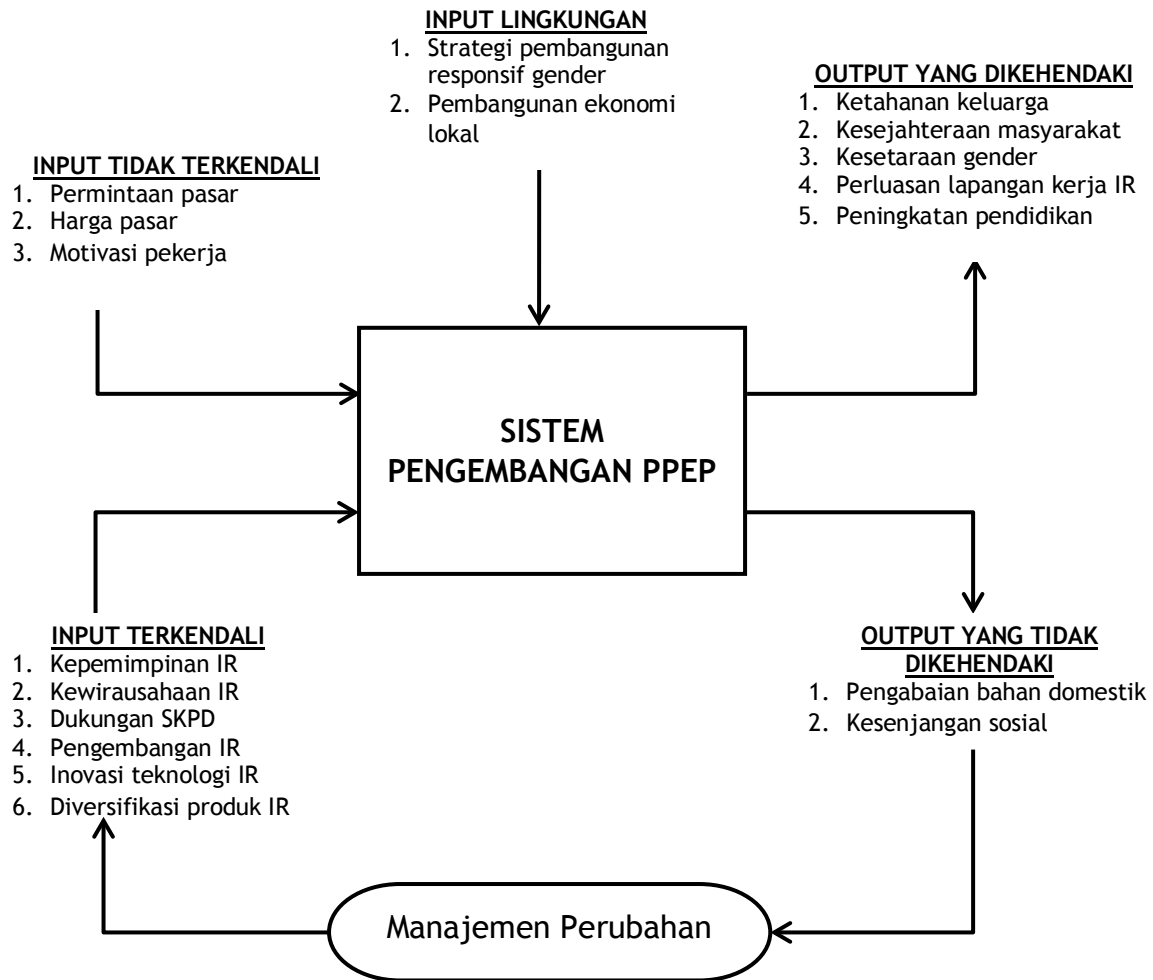
Keterbatasan dana pemerintah (*fiscal constraints*) menjadi kendala dalam upaya peningkatan produktivitas ekonomi perempuan. Untuk itu, ada empat hal yang perlu dilakukan dalam meningkatkan produktivitas perempuan. Pertama, mengintensifkan upaya untuk mengarusutamakan/memfokuskan peningkatan produktivitas ekonomi perempuan dalam seluruh sektor pembangunan secara sinergi, terutama di sektor-sektor yang melaksanakan pembangunan ekonomi rakyat. Kedua, menumbuhkan kesadaran sektor maupun pemerintah daerah untuk menghasilkan program-program yang tepat untuk meningkatkan produktivitas ekonomi perempuan. Ketiga, mendorong tumbuhnya forum komunikasi program peningkatan ekonomi perempuan untuk mengakses sumberdaya dan informasi program-program pemberdayaan ekonomi baik dari pemerintah, swasta atau pun organisasi non-pemerintah. Keempat, mengembangkan model desa mandiri untuk mengurangi beban keluarga miskin.

Kebijakan atas upaya peningkatan produktivitas perempuan dan pengurangan beban keluarga miskin terhadap beban biaya pendidikan dan kesehatan dalam rangka otonomi daerah adalah melakukan fasilitasi dan advokasi kepada

pemerintah daerah untuk mengembangkan suatu model desa/kelurahan yang mencerminkan upaya jaminan sosial ekonomi bagi keluarga miskin, khususnya pada perempuan dan anak. Model “Desa PRIMA” (Perempuan Indonesia Maju Mandiri) atau “Desa Mandiri” atau apapun namanya yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa, yaitu suatu model yang melibatkan seluruh masyarakat untuk ikut membangun desa, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan sekaligus mengentaskan kemiskinan desa melalui subsidi silang antar kelompok masyarakat yang berekonomi baik kepada masyarakat yang kurang beruntung.



Gambar 3. Keterkaitan PPEP dalam pengembangan Model Desa PRIMA



Gambar 4. Diagram Input-Output PPEP

Analisis sistem PPEP diwujudkan dalam diagram input output untuk memberikan arahan fokus dari program yang penting diketahui oleh Kementerian PPPA sebagai upaya partisipasi pada gerakan penanggulangan kemiskinan. Persoalan kepemimpinan dan kewirausahaan perempuan terkait dengan pembinaan industri rumahan pada skala mikro dan kecil adalah wahana KPPPA yang sesuai dengan visi-misinya. Oleh karena itu sepatutnya KPPPA berperan aktif dalam tim penanggulangan kemiskinan.

B. PPEP BERBASIS INDUSTRI RUMAHAN

Kebijakan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) sebagai landasan terdekat dalam Pembangunan Industri Rumahan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Perempuan menjadi dasar terungkapnya bahwa IR yang dilakukan kaum perempuan dapat menyerap tenaga

kerja, baik dari keluarga sendiri maupun tenaga kerja sekeliling rumah, seperti tetangganya. Hasil kajian yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Institut Pertanian Bogor (2011) membuktikan bahwa IR dapat membantu peningkatan kesejahteraan keluarga, menyerap dan menciptakan tenaga kerja, dan mengurangi keinginan tenaga kerja untuk migrasi menjadi tenaga kerja informal di luar negeri yang kerap kali menjadi sasaran perdagangan orang.

Berbagai program kegiatan terkait dengan pemberdayaan ekonomi pada hakekatnya dilakukan dan dikembangkan melalui upaya industri rumahan yang terus ditingkat melalui inovasi teknologi dalam peningkatan nilai tambah baik kualitas produknya, pengemasannya maupun pemasaran hasilnya.

Industri Rumahan (*Home Industry*) adalah aktivitas konkrit sebagai isi dalam berbagai kegiatan dalam pemberdayaan ekonomi rakyat dalam menanggulangi kemiskinan yang dilakukan oleh berbagai Kementerian dan lembaga, ternyata didominasi oleh kelompok perempuan seperti KUBE, UPPKS, UP2K dan bermacam nama kelompok lainnya . Kementerian Pemberdayaan perempuan sendiri pada era kepemimpinan lama juga telah berhasil merintis dan sampai saat ini masih berlanjut di beberapa daerah seperti *Program Peningkatan Pendapatan Ekonomi Lokal (P3EL)* dan *Program Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga sejahtera(P2WKSS)*. Program Simpan pinjam bagi kelompok perempuan sebagai bagian dari PNPM terbukti telah memberikan kontribusi bagi keberhasilan Penanggulan Kemiskinan perkotaan dengan NPL yang kecil.

IV. INDUSTRI RUMAHAN PENGGERAK PPEP

A. ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) telah diterbitkan tahun 2004 yang merupakan salah satu prioritas Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan pada saat itu dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi. Kebijakan PPEP ini sangat diperlukan dan berperan untuk menyinergikan program-program yang ada pada sektor terkait yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, agar upaya yang dilakukan dapat menjadi lebih efektif dan efisien, serta peran serta kelompok perempuan dalam pembangunan menjadi lebih nyata.

Pada tahun 2016 PPEP diaplikasikan dalam bentuk Industri Rumahan dimana KPPPA telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Perempuan.

Pengertian **Industri Rumahan (*Home Industry*)** adalah suatu sistem produksi yang menghasilkan suatu produk melalui proses pembentukan nilai tambah dari bahan baku tertentu, yang dilakukan di lokasi rumah dan bukan di suatu lokasi khusus (seperti pabrik), dengan menggunakan alat-alat produksi yang sederhana. Proses produksi tersebut memanfaatkan prasarana, sarana, serta peralatan produksi lainnya yang dimiliki oleh perorangan/kelompok usaha bersama/koperasi. Umumnya produk dari Industri Rumahan (IR) berupa buatan tangan (*hand made*), bersifat unik pada cara-cara yang berbeda nyata, serta sering dikaitkan dengan kearifan lokal dan teknologi tepat sasaran.

Dalam konteks Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, IR termasuk kelompok Usaha Mikro (*Micro Enterprises*), dimana banyak negara memasukkan pada kategori sektor informal. Sebagian besar IR belum mempunyai legalitas sebagai badan usaha dan seringkali tidak terdaftar dalam mekanisme perpajakan bisnis. Selain itu, IR biasanya dikelola oleh anggota suatu keluarga, meski ada pengecualian pada yang sudah dikategorikan maju dan menerapkan manajemen industri. IR bisa juga berwujud Kelompok Usaha Bersama yang terorganisir secara informal dan lentur

dimana masing-masing anggotanya bekerja di *rumah* masing-masing, sehingga disepadankan dengan istilah Industri Rumah Tangga (IRT).

Salah satu komponen usaha mikro dan kecil yang masih membutuhkan perhatian pemerintah adalah Industri Rumahan (IR) yang berada di sistem ekonomi rumah tangga yang banyak melibatkan kaum perempuan. Pemberdayaan perempuan di sektor tersebut relevan dengan rencana strategi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), khususnya dalam konteks pengarusutamaan gender (PUG) di bidang ekonomi.

Industri rumahan (IR) berpotensi besar dalam memperkuat ketahanan keluarga, baik dari aspek ekonomi, kesehatan, dan pendidikan, serta relasi anggota keluarga yang lebih harmonis. Selain itu IR mendorong kemandirian perempuan di bidang ekonomi yang juga berdampak pada pengambilan keputusan.

IR umumnya memanfaatkan dan menghasilkan produk lokal berupa barang jadi. IR juga dapat menciptakan lapangan kerja baru, menyerap banyak tenaga kerja untuk bekerja di rumah, memberi peluang kepada tetangga di sekelilingnya sebagai pekerja paruh waktu ataupun mencegah migrasi penduduk produktif untuk menjadi tenaga kerja ke luar negeri.

Pembangunan Industri Rumahan sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Nomor 2 tahun 2016, tentang Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Perempuan. Pada Pasal 2 dinyatakan bahwa Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Perempuan bertujuan untuk melaksanakan pembangunan industri rumahan yang terkoordinasi, efektif, dan efisien agar industri rumahan bertransformasi menjadi usaha kecil dan dapat menjadi sumber penghasilan dan peningkatan pendapatan, ketahanan keluarga serta kehidupan berkelanjutan.

Pada Pasal 5 ayat 1 diuraikan Prinsip-prinsip pembangunan industri rumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a antara lain:

- a. membangun motivasi perempuan untuk maju;
- b. mengembangkan potensi perempuan dari semula belum berkembang menjadi berkembang;

- c. meningkatkan kemampuan perempuan pelaku usaha mikro menjadi pengusaha kecil;
- d. meningkatkan kemampuan perempuan untuk berwirausaha;
- e. membangun kemampuan perempuan untuk berproduksi;
- f. adanya komitmen pemerintah daerah;
- g. merupakan bagian dari kebijakan pemerintah daerah;
- h. mendayagunakan sumber daya lokal;
- i. mengembangkan industri rumahan untuk terhubung dengan pasar yang lebih luas; dan
- j. membangun legalitas usaha mikro.

Tolak ukur keberhasilan pembangunan industri rumahan sesuai dengan Pasal 9 yaitu Tolak ukur keberhasilan pembangunan industri rumahan dilihat dari meningkatnya jumlah pelaku atau jumlah industri rumahan yang menjadi usaha kecil di seluruh daerah secara merata dan berkesinambungan.

B. STUDI KASUS

Studi kasus pada kajian ini dilakukan di Kecamatan Lais, Kecamatan Sekayu dan Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin.

1. Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasin

Pemilik industri rumahan ini adalah Ibu Fani dengan produk handalannya kerupuk ikan. Usaha yang berdiri sejak tahun 1992 ini sudah mendapatkan SIUP dan TDP. Bahan baku yang digunakan yaitu ikan gabus, ikan sepat, dan tepung terigu. Produk kerupuk ikan ini dipilih karena mudah mendapatkan bahan baku ikan, mudah dijual, dan daya tahan produk cukup lama 3 bulan. Pengerjaan kerupuk dilakukan langsung oleh Ibu Fani (tidak mempekerjakan karyawan), sedangkan pemasaran dilakukan oleh suaminya. Harga bahan baku ikan Rp20.000/kg dan untuk yang sudah diseset Rp35.000/kg. Harga produk dengan kisaran harga saat bahan baku tersedia banyak dan saat langka yaitu Rp100.000/kg - Rp150.000/kg untuk kerupuk ikan gabus dan Rp50.000/kg - Rp70.000/kg untuk kerupuk ikan sepat. Alat yang dimiliki berupa mesin giling ikan dengan listrik sebagai sumber energinya. Penjualan produk dilakukan di rumah dan di mini market (Indah Sari, Rian, dan Pelangi) di Kecamatan

Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba). Pembinaan dilakukan oleh SKPD Kabupaten Muba dengan fasilitasi pelatihan dan penyediaan peralatan:

- a) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP)
- b) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- c) Dinas Perikanan (pernah memberikan peralatan mesin giling ikan)
- d) Dinas Kesehatan



2. Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin

Ibu Roswita pemilik usaha ikan asin gabus, sepat dan truman telah mendirikan usaha ini bersama suaminya, hingga kini mempunyai 4 karyawan. Produknya yang terkenal yaitu produk ikan asin gabus keriting. Berikut harga produk yang dihasilkan Ibu Roswita ikan asin gabus Rp55.000/kg, ikan asin sepat Rp20.000/kg dan ikan asin Truman Rp55.000/kg. Sampai saat ini kapasitas produksi mencapai 800 kg (8 pikul) per minggu. Dari 1 kg ikan segar dihasilkan 6,5 ons ikan asin. Proses pengerjaan ikan asin dilakukan oleh ibu Roswita, sedangkan pemasaran dilaksanakan oleh suaminya. Mendapatkan pinjaman dari pelanggan (Tauke Cina di Palembang) Rp15.000.000 yang dikompensasi dengan diberikan prioritas mengambil produk ikan asin di rumah setiap

minggu dengan harga yang ditentukan pelanggan. Umumnya harga ikan asin bila dijual bebas lebih tinggi Rp5.000/kg.



3. Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin

Pemilik usaha ini bernama Ibu Nurhayati, yang sudah sejak lama menghasilkan produk ikan asap lais, gabus, dan Truman, ikan asin seluang serta Bekasam ikan gabus dan ikan truman (ikan olahan fermentasi). Terkenal dengan produk ikan asap lais (ikan lokal) dengan kualitas bagus karena pengasapan dilakukan selama 24 jam dengan kayu hidup (bukan kayu kering) yang menghasilkan rasa asap yang khas. Pengerjaan produk ikan asap dan bekasam dilaksanakan oleh suami, sedangkan pemasaran oleh Ibu Nurhayati.

Harga produk ikan asap lais Rp300.000/kg, ikan asap gabus Rp150.000/kg, dan ikan asap Truman Rp200.000/kg. Mampu memberikan Rp2.000.000 per minggu kepada 2 anak (mahasiswa) yang kuliah di Universitas Sriwijaya - Palembang dan Universitas Gajah Mada - Yogyakarta.



V. UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

A. ASPEK PENGEMBANGAN BISNIS

Untuk merumuskan kebijakan pada suatu sektor pembangunan perkonomian tertentu, diperlukan analisa parapihak (*stakeholder analysis*) sebagai upaya menjangring aspirasi dan inspirasi semua pelaku yang terlibat, terutama dari institusi serta lembaga masyarakat. Naskah ini dilengkapi dengan kajian akademik, melalui survei pakar dengan teknik AHP yang bertujuan untuk verifikasi ilmiah tentang kebutuhan sistemnya. Pada Gambar 5 disajikan struktur *Analytic Hierarchi Process* (AHP) dari sistem pengembangan ekonomi rumah tangga dengan prioritas sebagai berikut

1. Faktor yang dipentingkan adalah kewirausahaan dan motivasi
2. Aktor yang perannya dominan adalah wirausaha perempuan
3. Tujuan yang paling diprioritaskan adalah perluasan lapangan kerja serta peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak
4. Kebijakan yang segera diperlukan adalah dalam bentuk Peraturan Presiden tentang koordinasi Pembangunan Industri Rumahan.

Analisa kebutuhan setiap aktor (parapihak) yang terlibat dalam pengembangan Industri Rumahan melalui pemberdayaan perempuan diuraikan dengan rinci pada Tabel 2.

Tabel 2. Analisa Kebutuhan Para Pihak

No	Para Pihak (Aktor)	Kebutuhan Utama
1	Pemilik Industri Rumahan (Wirausaha perempuan)	Keberlanjutan usaha (<i>sustainable</i>) Kelayakan bisnis (<i>profitable</i>) Pendapatan yang stabil Permintaan produk yang terjamin Perlindungan HAKI
2	Tenaga Kerja Industri Rumahan	Pendapatan keluarga naik Keberlanjutan kerja Beban domestik yang seimbang
3	Konsumen/Pembeli	Kualitas produk yang konsisten Produk yang khas dan unik Harga terjangkau
4	Pedagang	Margin yang tinggi Ketersediaan stok Biaya transaksi murah
5	Masyarakat Lokal	Lapangan pekerjaan tersedia Limbah industri rendah Kesejahteraan keluarga meningkat

No	Para Pihak (Aktor)	Kebutuhan Utama
6	Pemerintah	Pengangguran menurun Kemiskinan berkurang Keseimbangan gender
7	Lembaga Sosial Masyarakat	Pemberdayaan perempuan Keseimbangan gender Lingkungan yang sehat
8	Lembaga Ekonomi Masyarakat	Pertumbuhan ekonomi daerah Meningkatkan investasi Akses ke lembaga keuangan

Setiap aktor mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda sesuai dengan fungsi dan perannya dalam pengembangan IR melalui pemberdayaan perempuan, dimana setiap kebutuhan tersebut mempunyai derajat kepentingan yang berbeda namun satu sama lain saling terkait membentuk suatu diagram sebab-akibat.

Kebijakan publik yang berorientasi pada solusi permasalahan yang rumit umumnya diawali dengan Analisa Kebutuhan para pihak yang kemudian disinkronkan dengan temuan lapang (Survei Industri Rumahan) sehingga menghasilkan identifikasi Hambatan dan Daya Penggerak (*driving force*) dari program pengembangannya. Berdasarkan studi kasus berbagai contoh Industri Rumahan, baik yang kategori pemula sampai yang maju, dapat disampaikan konklusinya sebagai berikut:

1. Hambatan Pengembangan IR, meliputi Konsistensi Mutu Produk, Pemasaran/Promosi Produk, Permodalan Usaha, Manajemen Keuangan, Transfer Keahlian dan Akses Informasi Kebijakan/Perizinan.
2. Daya Penggerak Bisnis IR, meliputi Kepercayaan Konsumen/Pelanggan, Motivasi, Jiwa Kewirausahaan, Inovasi dan Kreativitas, Keterampilan Khusus, Manfaat IR untuk Pengurangan Urbanisasi/Arus TKI dan Pengembangan Diri (*Self Improvement*).

Dari kumpulan perihal hambatan dan daya penggerak tersebut, disusunlah Rumusan Kebijakan Publik yang juga terfokus pada peran dan fungsi KemenPP dan PA serta berbagai pengalaman birokrasi sebelumnya.

Kebijakan pemberdayaan ekonomi rumah tangga melalui pemberdayaan usaha ibu-ibu rumah tangga umumnya dalam sektor industri kreatif dan berbasis sumberdaya lokal misalnya industri kerajinan, dan makanan. Dalam pengertian disebutkan bahwa industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan

kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan memberdayakan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut.

B. ASPEK KETENAGAKERJAAN

Sebagian besar lapangan kerja di perusahaan pada tingkat organisasi yang rendah dan tidak membutuhkan ketrampilan yang khusus lebih banyak memberi peluang bagi tenaga kerja wanita. Tuntutan ekonomi yang mendesak, dan berkurangnya peluang serta penghasilan di bidang pertanian yang tidak memberikan suatu hasil yang tepat dan rutin, dan adanya kesempatan untuk bekerja di bidang industri telah memberikan daya tarik yang kuat bagi tenaga kerja wanita. Tidak hanya pada tenaga kerja wanita yang sudah dewasa yang sudah dapat di golongankan pada angkatan kerja, tetapi sering juga wanita yang belum dewasa yang selayaknya masih harus belajar di bangku sekolah.

Oleh karena itu, perlu adanya peraturan perlindungan tenaga kerja perempuan. Dalam peraturan yang disusun seyogyanya dapat mencegah kekerasan terhadap perempuan serta perspektif terutama dalam persoalan Tenaga Kerja Indonesia yang di satu sisi mendatangkan devisa dan pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi, akan tetapi menimbulkan tuntutan adanya aturan perlindungan di luar negeri. Kepekaan gender akan membuat pemerintah lebih teliti melihat persoalan tenaga kerja dan mampu mengidentifikasi jenis kekerasan spesifik yang terjadi terhadap perempuan.

Dalam upaya mencegah terjadinya ketidak-adilan hak tenaga kerja perempuan, maka pengaturan industri rumahan yang sebagian besar dikelola oleh kaum perempuan menjadi sangat penting, dengan tidak menghilangkan hak dan kewajibannya sebagai pengelola rumah tangga. Dengan pendapatan tambahan dari industri rumahan, perempuan yang bekerja di rumah secara tidak langsung akan mengurangi pengangguran, khususnya pengangguran perempuan terselubung dan tentunya meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Perempuan umumnya bergerak di sektor primer dan tertier, dimana status pekerjaan terbanyak sebagai buruh sektor informal (55%), termasuk menjadi pedagang kecil-kecilan, bahkan cukup banyak sebagai pekerja keluarga tanpa upah. Kondisi buruh perempuan di sektor formal tidak selalu lebih baik dari

perempuan yang berkecimpung di sektor informal. Buruh yang bekerja di sektor industri, meskipun sejumlah hak-hak perempuan telah dilindungi melalui UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagian besar perusahaan hampir tidak memperhatikan masalah-masalah yang spesifik yang dialami buruh perempuan, seperti masalah cuti haid, cuti melahirkan, tunjangan untuk kehamilan dan menyusui, dan fasilitas tempat penitipan anak. Perusahaan tidak memberikan hak-hak tersebut di atas karena dianggap mengganggu produktivitas kerja perusahaan dan menyebabkan biaya produksi besar.

Dalam kaitan perlindungan ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja untuk menjamin hak-hak dasar pekerja, dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Undang-undang tersebut secara jelas memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja wanita khususnya diatur dalam pasal 76-84. Perlindungan tenaga kerja wanita untuk menghindarkan berbagai pengaruh buruk yang mungkin timbul akibat keterlibatannya dalam lapangan kerja yang kondisinya membahayakan kesehatan dan keselamatan serta berbagai aturan lainnya diantaranya meliputi waktu kerja, waktu cuti melahirkan, perlindungan dari jenis pekerjaan terburuk, dsb.

Sumberdaya manusia merupakan komponen input penting dalam suatu usaha, termasuk industri rumahan. Industri rumahan menggunakan anggota rumah tangga sebagai pekerja, maka salah satu kelemahannya adalah kurangnya keahlian dan keterampilan. Pengembangan sumber daya manusia IR difokuskan pada pengembangan kapasitas manusia IR dan pembangunan kapasitas kelembagaan melalui pendidikan non formal. Program-program untuk pengembangan ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

1. **Penyadaran kewirausahaan**

Penyuluhan kewirausahaan diarahkan untuk meningkatkan jiwa wirausaha, minat berusaha, dan kemampuan berbisnis bagi kaum perempuan dan juga para pemuda (laki-laki dan perempuan). Dengan penyadaran diharapkan usaha rumahan yang sudah ada dapat berjalan lebih berkembang

dan akan tumbuh usaha-usaha rumahan baru yang tidak hanya dapat meningkatkan perekonomian keluarga tetapi juga masyarakat sekitar.

2. Pelatihan teknis produksi

Pelatihan teknis produksi dilakukan sesuai dengan kondisi sumberdaya atau potensi lokal dan kebutuhan masyarakat. Pelatihan ini juga mencakup bagaimana berproduksi dengan kualitas yang baik dan menggunakan bahan-bahan yang aman dikonsumsi khususnya bagi produk makanan. Dalam melaksanakan pelatihan ini membutuhkan pelatih, fasilitator atau narasumber yang kompeten dan menguasai teknis produksi sesuai kebutuhan. Oleh karena itu kerjasama dengan instansi teknis terkait sangat diperlukan.

3. Pelatihan manajemen keuangan

Pelatihan manajemen keuangan tidak hanya terbatas pada keuangan perusahaan tetapi juga keuangan keluarga. Para pengusaha rumahan, khususnya ibu rumah tangga perlu ditekankan bahwa keuangan usaha harus terpisah dari keuangan rumah tangga.

4. Pengembangan kapasitas baik dari aspek bisnis maupun aspek sosial lain seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan terhadap pengambilan keputusan, dan lain-lain. Program ini dapat berupa pendidikan non formal seperti kejar paket untuk meningkatkan kapasitas perempuan dalam hal membaca, menulis dan menghitung yang sangat dibutuhkan untuk mengelola kegiatan usahanya. Selain itu kesadaran akan pentingnya kesehatan serta kesadaran akan pentingnya gender juga perlu disampaikan.

Menghadapi kenyataan permasalahan ketenagakerjaan nasional ini maka pilihannya terletak bagaimana menemukan langkah kebijakan yang dapat memperbaiki iklim ketenagakerjaan. Tentunya melalui upaya peningkatan standar kompetensi sumber daya manusia yang ada, termasuk menjaga harmonisasi hubungan industrial dan peningkatan pengawasan ketenagakerjaan. Penciptaan lapangan pekerjaan pada sektor informal masih merupakan solusi alternatif yang tepat dan memiliki kekuatan dalam membangun kesejahteraan masyarakat diantaranya melalui pembinaan dan pendampingan industri rumahan secara berkelanjutan.

C. ASPEK KELEMBAGAAN

Kelembagaan adalah mekanisme dan wahana peran serta kaum perempuan dalam kegiatan produktif melalui Industri Rumahan. Tujuan pembinaan kelembagaan adalah membangun kebersamaan dan kemitraan bisnis dalam bentuk koperasi maupun Lembaga Swakarsa Masyarakat. Kelembagaan disini tidak saja mencakup struktur pengorganisasian tapi juga sistem nilai dan etika kerjanya.

1. Koperasi Wanita

Koperasi wanita di Indonesia memiliki peranan yang cukup berarti dilihat dari beberapa hasil studi kasus tentang koperasi yang menunjukkan bahwa keberadaan koperasi tidak saja menguntungkan pada anggota koperasi tetapi juga telah berperan dalam penyerapan tenaga kerja dan memberikan tingkat kesejahteraan yang lebih baik untuk komunitas dimana koperasi tersebut berada. Keberadaan dan perkembangan koperasi khususnya koperasi yang dikelola wanita di Indonesia menarik perhatian Pemerintah maupun para pembina karena koperasi-koperasi tersebut menunjukkan perkembangan kinerja yang baik. Hal ini dapat dilihat dari sisi manajemen organisasi maupun diversifikasi usaha.

Koperasi wanita pada umumnya memiliki kegiatan yang diorientasikan kepada pemenuhan kebutuhan dan pemecahan persoalan wanita baik yang bersifat konsumtif, produktif maupun kesehatan reproduksi. Namun juga mulai bergerak di sektor Jasa Keuangan (KSP), dan Industri Rumahan seperti yang dipraktekkan di Koperasi Wanita Setia Bhakti di Surabaya.

Koperasi menciptakan peluang bagi wirausaha perempuan untuk membantu diri sendiri. Lebih dari 800 juta orang diseluruh dunia sudah menjadi anggota koperasi. Meskipun koperasi lebih memberi fokus untuk memenuhi kebutuhan lokal para anggotanya, mereka juga bisa bekerjasama dan terkait secara nasional. Basis demokrasi dan kombinasi tujuan sosial ekonomi yang unik menempatkan koperasi sebagai lembaga ideal yang berperan untuk meningkatkan kelayakan bisnis di pasar regional.

Untuk menghadapi era persaingan pasar bebas pengembangan peran perempuan melalui **koperasi wanita** (Kopwan), akan menjadi salah satu titik tumbuh sebagai perluasan kesempatan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk menunjukkan eksistensi dalam kancah perekonomian dunia.

Program pemanfaatan koperasi wanita sebagai upaya pemberantasan kemiskinan berjalan dari tingkat nasional sampai pada tingkat kabupaten/kota. Pemerintah melaksanakan beberapa program yang ditujukan untuk dapat menstimulus perkembangan koperasi tersebut. Salah satu program Kementerian KUKM yang cukup efektif dilakukan adalah memberikan perkuatan modal kepada koperasi wanita yang telahberjlaan dengan baik.

Karakter industri rumahan umumnya tersebar di suatu wilayah perkampungan atau pedesaan. Hal ini menyulitkan pengelompokkan sebagai upaya efisiensi bisnis, karena kesulitan komunikasi maupun transportasi. Jalan keluar guna membangun kelompok usaha adalah mendorong para pelaku IR, paling itdak berjumlah 20 orang, untuk bergabung dalam **Koperasi Wanita**. Proses ini dapat difasilitasi oleh Kementerian PP dan PA dengan Dinas KUKM setempat.

2. Lembaga Swakarsa Masyarakat

Perkembangan Industri Rumahan tidak bisa terlepas dari Lembaga Swakarsa Masyarakat seperti pada gerakan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang kelebagaannya dibentuk pada tahun 1972 dengan lahirnya tim penggerak PKK. Yang dimaksud dengan Swakarsa adalah kelembagaan yang diprakarsi masyarakat dimana peran pemerintah adalah sebagai motivator dan fasilitator.

PKK adalah suatu gerakan pembangunan yang tumbuh dari bawah, dikelola oleh, dari dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang sejahtera. PKK adalah lembaga sosial kemasyarakatan yang independen non profit dan tidak berafiliasi kepada suatu partai politik tertentu.

Gerakan PKK bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Dalam hal kebutuhan pangan, PKK menggalakkan penyuluhan untuk pemanfaatan pekarangan, antara lain dengan menanam tanaman yang bermanfaat, seperti sayuran, ubi-ubian, buah-buahan dan bumbu-bumbuan. Bahkan juga dianjurkan memelihara unggas dan ikan serta cara

pemeliharaannya di lahan pekarangan mereka sendiri. Hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan keluarga, dan selebihnya dapat dijual untuk menambah pendapatan keluarga dan meningkatkan penganekaragaman pangan lokal.

Perhatian khusus ditujukan pada kesehatan ibu dan anak, pasangan usia subur, ibu hamil dan ibu menyusui. Untuk mendekatkan sistem pelayanan kesehatan kepada golongan ini, dibentuk **Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU)**, dengan kader Posyandu yang terlatih.

Ada 5 Pelayanan Dasar di Posyandu, yaitu : Imunisasi, Gizi, Keluarga Berencana, Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), dan Penanggulangan Diare. Secara teratur ibu hamil memeriksakan diri di Posyandu, dan membawa anak balitanya untuk pemeriksaan kesehatan (penimbangan anak dan imunisasi). Penyuluhan tentang kesehatan, gizi dan keluarga berencana diadakan di Posyandu, bahkan diadakan pula pemberian makanan tambahan serta demonstrasi tentang makanan bergizi.

PKK menganjurkan pembentukan **koperasi** sebagai upaya pemberdayaan keluarga dengan meningkatkan pendapatan. Koperasi juga merupakan jalur yang baik dalam melatih mewujudkan prinsip kehidupan demokratis dan kerjasama antar-manusia. **Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)** di beberapa daerah ditingkatkan menjadi **koperasi**. Selain manfaat bagi peningkatan ekonomi keluarga, koperasi juga dapat menjadi jalur menciptakan lapangan kerja setempat.

Proses belajar program kursus berdasarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan peserta kursus. Selesai kursus kelompok belajar diikuti dalam kursus keterampilan kerja, dan selanjutnya kelompok diberi modal usaha. Selain dari itu, PKK juga menggalakkan pelatihan atau kursus untuk membuat berbagai kerajinan tangan, produk-produk makanan dan minuman yang hasilnya dapat dijual. Ini membantu meningkatkan pendapatan keluarga.

Setelah menelaah “ber practice” dari kelembagaan swakarsa masyarakat yang berbentuk gerakan PKK, maka tindak lanjutnya adalah bagaimana strategi pembangunan IR dapat dimasukkan sebagai bagian Program Pokok PKK di masa mendatang. Apalagi terdapat kemungkinan bermitra kerja dengan program PNPM-khusus bagi perempuan yang dikelola oleh Kementerian Koordinator Perekonomian. Sinergi dari kegiatan PKK dengan

dukungan dana PNPM-Mandiri akan menumbuhkembangkan IR-Pemula yang lebih banyak di daerah, terutama daerah perbatasan dan pulau-pulau terpencil. Selain itu sinergi tersebut juga akan memperluas jaringan pasar dan memperbanyak diferensiasi pendukung bagi IR-Berkembang. Karena operasionalisasi berada di daerah-daerah, maka peran PEMDA dalam aplikasi koordinasi sangat penting, terutama oleh Bappeda dan Badan Pemberdayaan Perempuan di daerah.

D. ASPEK PEMBIAYAAN USAHA

Tujuan dari pembiayaan IR adalah untuk meningkatkan Keberlanjutan Bisnis (*Business Sustainability*) IR. Masalah Utama pembiayaan IR bukan pada ketersediaan dana untuk investasi atau modal kerja IR tetapi pada (1) Mekanisme penyampaian ke IR (*delivery mechanism*) dan (2) Identifikasi dan penetapan sasaran IR (*targetting*).

1. Lembaga Keuangan Mikro

Sumber pembiayaan untuk Industri Rumahan terdiri dari Non Formal, Semi Formal dan Formal. Sumber pembiayaan non formal di fokuskan untuk IR tipe 1 (pemula) yang dananya dapat berasal dari modal sendiri, pelepas uang/ rentenir, pedagang/ pembeli produk, keluarga/ angel investor dan gadai.

Pembiayaan semi formal bersumber dari APBN (PNPM Mandiri Kemendagri, KUBE Kemensos dan lain-lain), APBD (dana berbantuan) dan Dana Swasta (CSR atau PKBL), melalui Lembaga Keuangan Mikro diberikan kepada IR Pemula atau langsung diberikan kepada IR Berkembang.

2. Kredit Usaha Mikro Industri Rumahan

Penerapan Kredit Usaha dengan skim KUR-Mikro dari Bank Pembangunan Daerah perlu dirancang khusus untuk Industri Rumahan Maju (IR-M) yang berpotensi meningkatkan kapasitasnya serta mempunyai track record baik namun tidak mempunyai anggaran guna pengembangan bisnisnya. Dari kajian lapang pada bermacam IR-Maju di Bogor, Bukittinggi, Makassar dan Mataram, dapat disimpulkan bahwa akses ke perbankan masih membutuhkan insentif khusus terutama dalam penjaminan yang tidak melibatkan aset rumah dan tanah milik keluarga. Selain itu, prosedur dan persyaratan yang mudah diurus

akan menghilangkan hambatan psikologis pelaku IR-Maju untuk berurusan dengan birokrasi perbankan.

Dari sisi tingkat bunga sebenarnya tidak jadi masalah pokok, namun setiap keringanan dalam bentuk subsidi bunga akan membangun motivasi IR-Maju untuk memperluas usahanya. Mekanisasi bagi hasil lebih diminati, oleh karena itu peranan Bank Syariah ataupun BMT perlu didorong. Observasi lapang menengarai potensi pasar yang masih besar bagi produk-produk kreatif IR-Maju.

Kebijakan kredit usaha rakyat IR dengan skim penjaminan KUR dari BUMN dan peluang adanya subsidi bunga sejenis Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) dari Kementerian Pertanian memiliki karakter sebagai berikut :

- a. Aksesabilitas, kemampuan untuk menjangkau daerah terpencil, minim infrastruktur dan berkekurangan dalam fasilitas komunikasi. Hal ini penting dirancang dengan "formal linkage", karena instrumen penunjang perbankan seperti pemanfaatan lembaga keuangan mikro setempat sebagai mitra kerja
- b. Keberlanjutan, artinya sifat skim bukan atas mekanisme proyek tapi merupakan program daerah yang kontinyu serta menuju kemampuan skim berkembang atas kemampuan sendiri. Tingkat keberlanjutan skim sangat tergantung pada sistem monitoring dan evaluasinya.
- c. Informatif, yaitu adanya mekanisme telaah yang dapat dipecah dari proses penyaluran sampai dengan dampak atas terlaksananya skim KUR-IR tersebut. Oleh karena itu, tata kerja pendampingan bagi para tani dan nelayan amat penting agar skim kredit ini tidak dimanfaatkan oleh para elite desa ataupun pelepas uang lokal.
- d. Transparansi, dimana bantuan dana yang menopang terlaksananya KUR-IR ini dapat tertata secara efisien dan mudah dipantau. Teknik pemilihan sasaran serta mekanisme penyaluran kredit terhitung kompleks, karena melibatkan poses anggaran belanja pemerintah pusat dan daerah, agar tidak terjadi kredit macet, aktivitas pemantauan harus komprehensif dan tertib.

E. ASPEK INFRASTRUKTUR

Banyak faktor yang memiliki peran sebagai faktor penghambat maupun faktor pendukung terhadap peningkatan keberhasilan dalam pemberdayaan dan pengembangan industri rumahan. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah hasil pembangunan infrastruktur. Ketika capaian pembangunan infrastruktur tidak optimal serta tidak merata, maka pemberdayaan dan pengembangan industri rumahan tidak akan berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dengan demikian pada hasil akhirnya, belum mampu secara optimal mencapai outcome/dampak berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat maupun sekitarnya.

1. Infrastruktur Pendukung Pengembangan IR

Infrastruktur fisik dan sosial dapat didefinisikan sebagai kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor publik dan sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik. Istilah ini umumnya merujuk kepada hal infrastruktur teknis atau fisik yang mendukung jaringan struktur seperti fasilitas antara lain dapat berupa jalan, kereta api, air bersih, bandara, kanal, waduk, tanggul, pengolahan limbah, perlistrikan, telekomunikasi, pelabuhan. Secara fungsional, infrastruktur selain fasilitasi dapat pula mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat, distribusi aliran produksi barang dan jasa sebagai contoh jalan dapat melancarkan transportasi pengiriman bahan baku sampai ke pabrik kemudian untuk distribusi ke pasar hingga sampai kepada masyarakat. Dalam beberapa pengertian infrastruktur termasuk pula infrastruktur sosial kebutuhan dasar seperti antara lain termasuk sekolah dan rumah sakit.

Sesuai pengertian tersebut, Infrastruktur yang mendukung pengembangan industri rumahan berupa infrastruktur fisik yang meliputi air bersih dan industri, listrik, transportasi serta pengolahan limbah. Infrastruktur tersebut juga sebagai bagian pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah pengembangan industri rumahan.

2. Analisa Sistem Infrastruktur IR

Diagram sebab akibat berguna untuk mengidentifikasi suatu sistem yang akan dibangun. Identifikasi sistem merupakan suatu rantai hubungan antara pernyataan-pernyataan dari kebutuhan dengan pernyataan khusus dari masalah yang harus dipecahkan untuk mencukupi kebutuhan tersebut (Eriyatno, 1999).

Ketersediaan dan keterjangkauan infrastruktur air bersih, listrik, transportasi dan pengolahan limbah yang memadai diharapkan akan meningkatkan indeks kinerja IR. Peningkatan indeks kinerja IR akan berpengaruh positif terhadap kualitas produk yang dihasilkan sehingga akan meningkatkan penjualan yang merupakan faktor penting dalam peningkatan pendapatan IR. Peningkatan pendapatan IR berdampak pada pengembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Dengan hal ini maka IR akan mampu membayar iuran penyediaan infrastruktur dengan baik dan lancar. Dana inilah yang selanjutnya akan menunjang peningkatan fasilitas penyediaan infrastruktur. Agar berdampak positif terhadap usaha, lingkungan dan sosial, maka diperlukan fasilitas penanganan limbah dengan pengolahan dan pembuangan yang tepat sehingga akan menurunkan biaya dan resiko lingkungan. Hal ini diharapkan juga dapat meningkatkan pendapatan IR, dengan tujuan IR akan mampu membayar iuran yang akan digunakan untuk peningkatan fasilitas infrastruktur.

3. Kebijakan Infrastruktur IR

Model Umum Sistem Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Industri Rumah Tangga melibatkan berbagai pihak baik di pusat dan di daerah. Dalam pelaksanaan sistem infrastruktur di tingkat pusat perlu dilakukan koordinasi antara Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PU dengan Kementerian PP dan PA sebagai koordinator.

Kementerian BUMN selain berkoordinasi dengan Kementerian PP dan PA, juga dapat memberikan arahan ke BUMN untuk memberikan pelayanan infrastruktur terkait penyediaan air, listrik, transportasi dan pengolahan limbah untuk mendukung usaha IR. Dalam kaitan kewenangan pembinaan dan

pengawasan industri di daerah terkait IR dan fasilitasi infrastruktur, Kementerian PP dan PA juga berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian di Dinas Perindustrian. Didukung untuk menyusun program fasilitasi infrastruktur pendukung bagi IR. Sementara itu Badan Pemberdayaan Perempuan di daerah kota atau kabupaten berkoordinasi langsung dengan Kementerian PP dan PA untuk evaluasi pelaksanaan program fasilitasi infrastruktur.

Selain berkoordinasi dengan Kementerian PP dan PA, Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan tugas dan pokok fungsinya berkoordinasi langsung dengan Pemerintah Daerah (Pemda). Dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemda dalam pengawasan berkoordinasi dengan Bappeda, Badan Pemberdayaan Perempuan dan dinas terkait di daerah seperti Dinas Perindustrian, Dinas Binamarga dan pengairan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup maupun BUMD untuk memberikan fasilitasi terkait infrastruktur untuk mendukung usaha IR.

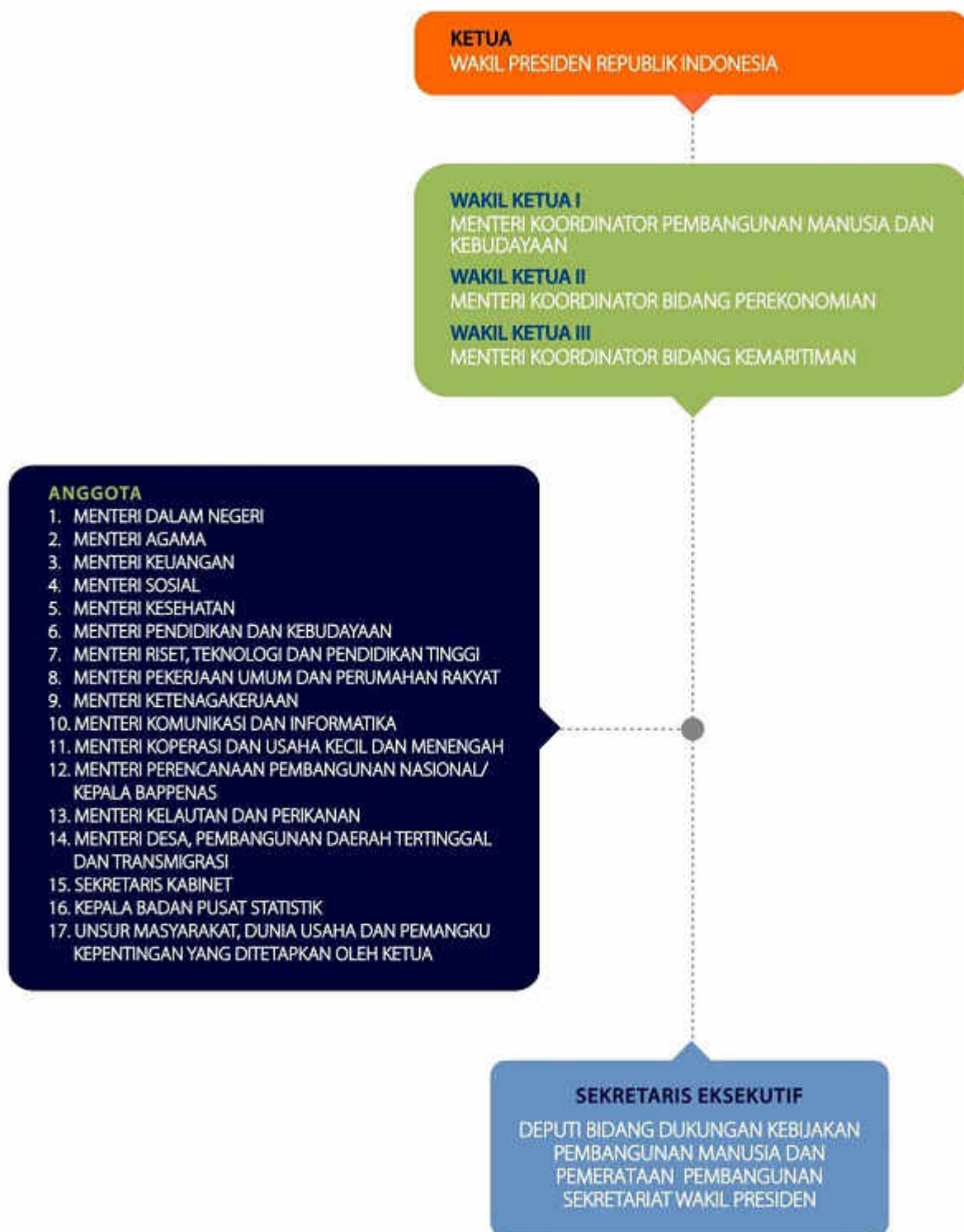
VI. KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

A. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TNP2K)

TNP2K merupakan lembaga yang dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat yang diketuai Wakil Presiden Republik Indonesia, yang bertujuan untuk menyelaraskan berbagai kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan. Dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan perubahannya No. 96 Tahun 2015. Tugas Pokok TNP2K adalah:

1. Menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan;
2. Melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi program-program penanggulangan kemiskinan di kementerian/lembaga;
3. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan;

TNP2K merupakan wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kelembagaan TNP2K diketuai oleh Wakil Presiden Republik Indonesia.



Gambar 5. Susunan Keanggotaan TNP2K

Dalam pelaksanaan tugasnya, apabila dipandang perlu Ketua TNP2K dapat mengikutsertakan kementerian/lembaga dan/atau unsur masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

TNP2K, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretaris Eksekutif, yang menjalankan fungsi mempersiapkan rumusan kebijakan dan program, menetapkan sasaran, membangun *database*, melakukan monitoring dan evaluasi, serta melakukan berbagai analisis yang diperlukan, serta memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada TNP2K.

TNP2K dibantu oleh Kelompok Kerja Pengendali yang bertugas mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Kelompok Kerja TNP2K terdiri atas:

1. Kelompok Kerja Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga, bertugas melakukan koordinasi kebijakan dan program serta pengendalian pelaksanaan program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga.
2. Kelompok Kerja Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, bertugas melakukan koordinasi kebijakan dan program serta pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.
3. Kelompok Kerja Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil, bertugas melakukan koordinasi kebijakan dan program serta pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil.

B. PERAN SERTA KPPA PADA PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

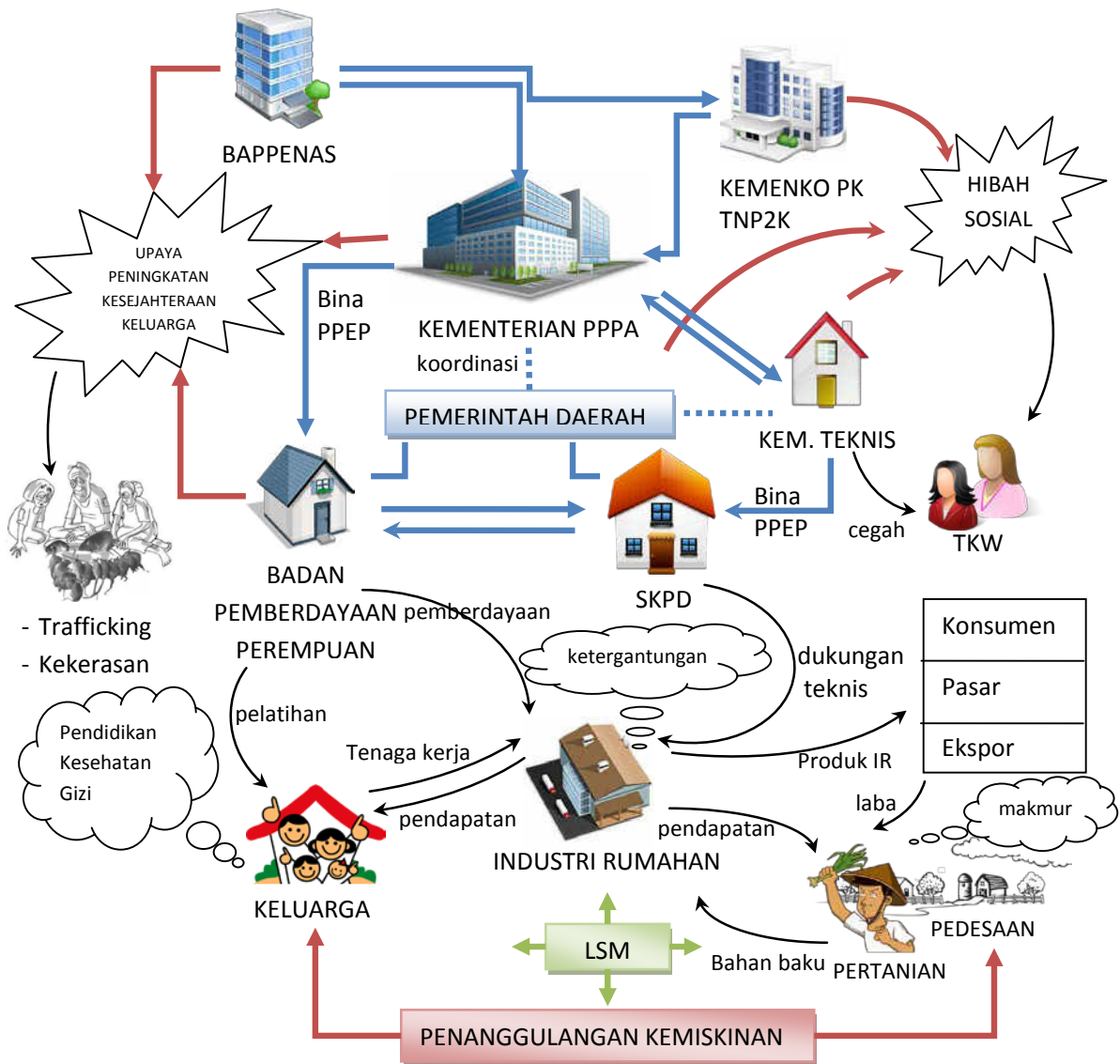
Kemiskinan adalah masalah bangsa yang belum dapat diselesaikan secara tuntas dan berkesinambungan dengan makin banyaknya bencana alam seperti banjir, longsor, kekeringan sampai kebakaran telah meningkatkan jumlah penduduk miskin. Turunnya pendapatan di perdesaan, meningkatnya kekerasan di perkotaan dan kerusuhan sosial umum disebabkan oleh dampak kemiskinan serta ketidakmerataan pembangunan. Berbagai upaya telah dirancang oleh pemerintah untuk menanggulangi kemelaratan seraya meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Upaya tersebut perlu dinaikkan manfaatnya melalui kerja bersama dari seluruh komponen masyarakat bersama dunia usaha dan

pemerintah. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) juga patut untuk berperan aktif sebagai bagian dari komponen pemerintah yang peduli akan nasib rakyat kecil.

Hasil studi ini menemukan betapa pentingnya peran Badan Pemberdayaan Perempuan di daerah dalam setiap kegiatan pengentasan kemiskinan terutama yang berdampak terhadap kesehatan ibu dan anak, serta gizi buruk yang sering dijumpai di daerah tertinggal. Sedangkan di tingkat pusat, studi ini telah mengidentifikasi adanya kesenjangan kebijakan penanggulangan kemiskinan karena belum diterapkan secara efektif strategi **Pembangunan Responsif Gender (PRG)**. Karena perempuan lebih dipandang sebagai objek pembangunan dan belum sebagai subjek pembangunan yang berarti terutama di bidang ekonomi. Untuk mendapatkan gambaran yang tersruktur tentang bagaimana Kemen PPPA mampu berperan serta pada upaya penanggulangan kemiskinan, tim studi telah menggali pengetahuan dari para narasumber ahli, dengan menggunakan **Soft System Methodology** (Checkland, 1990). Hasil kajian tersebut diekspresikan dalam format *Rich Picture*, *Root Definition* dan *Purposively Activity Map* (PAM); melalui survei pakar.

1. *Rich Picture*

Sebagai gambaran keterkaitan antar lembaga maka *Rich Picture* diekspresikan dalam gambar berikut, dimana KemenPPPA menjadi fokus pembahasan perannya.



Gambar 6. Rich Picture Peran Serta KPPPA pada Program Penanggulangan Kemiskinan

TNP2 : Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat Terkait PPEP

PPEP : Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan

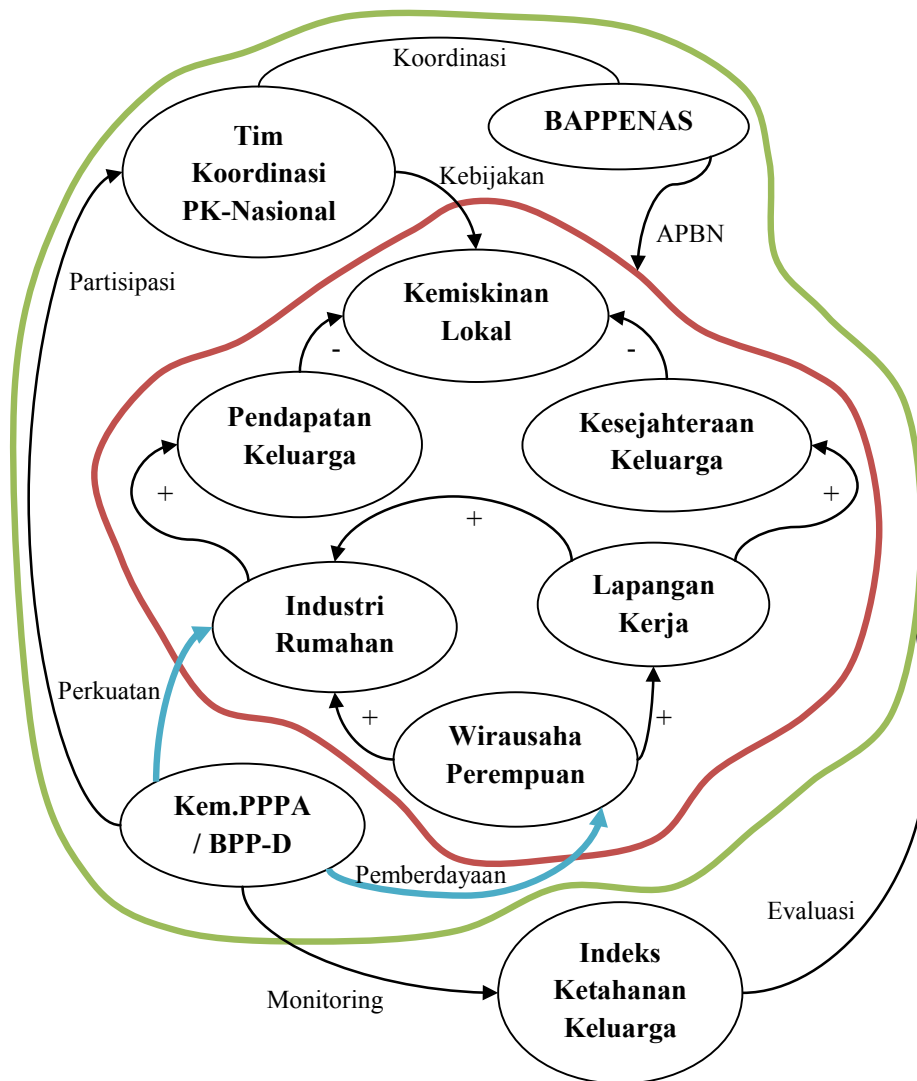
2. Definisi Jangkar (*Root Definition*)

Setelah menelaah *Rich Picture* dan mendapatkan masukan dari para pakar lintas disiplin dari Center for System (CS) maka definisi jangkar dari penempatan posisi KPPPA dalam upaya penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut:

- a) **Peran Serta KPPPA** adalah kegiatan produktif dan nyata di lapangan dalam upaya bersama untuk mengurangi tingkat kemiskinan di daerah, dengan bekerja sama Badan pemberdayaan perempuan serta SKPD, yang juga melibatkan partisipasi masyarakat serta dunia usaha melalui wadah program **Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan**, khususnya pembina Industri Rumahan dan kewirausahaan perempuan.
- b) **Posisi KPPPA** dalam mekanisme koordinasi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia & Kebudayaan (Kemenko PMK) dan Bappenas serta TNP2K, adalah memberikan wawasan aplikasi **Pembangunan Responsif Gender (PRG)** yang bermanfaat untuk mengurangi kekerasan, TKW/buruh migran, perdagangan anak dan perempuan (trafficking) serta dampak negative lainnya yang diakibatkan oleh kemiskinan dan kebodohan.
- c) **Program Aksi KPPPA** terkait kegiatan pengentasan kemiskinan di daerah tertinggal, terpencil dan terluar adalah fokus perencanaan, pemberdayaan serta pelaksanaan yang secara sistematis mewujudkan **solusi permanen** melalui perluasan dan penguatan Industri Rumahan terutama yang mengolah komoditi unggulan daerah untuk kearifan lokal seperti produk seni dan kerajinan rakyat.

3. *Purposively Activity Map (PAM)*

Dengan merujuk pada Definisi Jangkar (*Root Definition*) serta hasil observasi lapang, maka tim studi merumuskan PAM agar dapat dijadikan landasan rencana tindak KPPPA terkait dengan gerakan penanggulangan kemiskinan nasional.



Gambar 7. PAM Peranan KPPPA dalam Penanggulangan Kemsikinan

Dari RP, Definisi Jangkar, dan PAM dapat dirumuskan peran serta KPPPA dalam upaya penanggulangan kemiskinan sangat penting, tidak saja dalam kebijakan koordinatif untuk PRG, tapi lebih penting lagi dilakukan Program Aksi Pengembangan Industri Rumahan (*home indusy*).

Mempertimbangkan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, apabila dipandang perlu Ketua TNP2K dapat mengikutsertakan kementerian/lembaga dan/atau unsur masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya maka seyogyanya KPPPA masuk menjadi bagian anggota Tim Nasional Percepatan penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

VII. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

1. Penanggulangan Kemiskinan adalah program nasional yang membutuhkan perencanaan, pemberdayaan dan pengelolaan yang **integratif** dan **lintas sektor** sehingga dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan masyarakat, terutama di daerah terbelakang, terpencil, dan terluar.
2. KPPPA berkewajiban untuk berperan aktif dan tindak nyata pada kegiatan pengentasan kemiskinan serta pemerataan pembangunan, melalui pemberdayaan **wirausaha perempuan** serta perkuatan **Industri Rumahan** dalam kerangka Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan (PPEP).
3. Industri rumahan berpotensi besar untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional karena sebagai suatu sistem produksi bisa meningkatkan nilai tambah dari sumber daya lokal dalam skala usaha mikro yang tersebar diseluruh pelosok nusantara, baik diperkotaan maupun di pedesaan.
4. Sejalan dengan itu, pemerintah dapat mendukung, sesuai undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang UMKM, melalui akses modal, teknologi dan pemasaran yang dilengkapi dengan perkuatan SDM melalui upaya pemberdayaan wirausaha perempuan. Untuk itu diperlukan kordinasi lintas sektor dan kerjasama yang erat antara pemerintah pusat dan daerah serta pihak swasta dan lembaga keuangan.
5. Industri Rumahan ini didalam sistem ekonomi rumah tangga merupakan wadah kreativitas dan produktivitas kaum perempuan. Oleh karena itu dibutuhkan alokasi dana APBN/APBD yang memadai guna mendorong pertumbuhan sektor tersebut. Namun diduga pengelolaan database Industri Rumahan belum dilakukan dengan tertib dan teratur sehingga diperlukan kegiatan untuk menyusun Sistem Manajemen Basis Data (SMBD) Industri Rumahan.
6. KPPPA seyogyanya berada pada struktur koordinatif dan sinergi aksi penanggulangan kemiskinan baik di pusat maupun daerah, yang mencakup perumusan kebijakan sampai pada program aksi yang dapat diukur dampaknya

pada indeks ketahanan keluarga serta peningkatan pendapatan daerah setempat.

B. REKOMENDASI

1. Segera berkolaborasi (mungkinah) dan mengintegrasikan ~~aparap~~ dan program kerja KPPPA pada upaya bersama pengentasan kemiskinan dalam wadah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang ditetapkan melalui **Peraturan Presiden**.
2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dalam rencana strategis yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup keluarga, maka kegiatan Sistem Manajemen Basis Data (SMBD) Industri Rumahan merupakan upaya untuk mewujudkan misi tersebut. Adapun kualitas hidup keluarga meliputi kecukupan pangan, kesinambungan pendapatan, kesehatan ibu dan anak, pendidikan formal dan informal serta rumah yang sehat dan bebas limbah.
3. KPPPA mengatur struktur birokrasi dan Prosedur Operasional Baku pada Deputi yang terkait, sehingga dapat membuahkan **hasil nyata** dan **terukur** dari gerakan penanggulangan kemiskinan di daerah tertinggal, terpencil, dan terluar.

DAFTAR PUSTAKA

- _____.2011. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) IPB : Baseline Survey Industri Rumah (Cottage Industry). Laporan Studi.
- _____.2011. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Center for Policy Reform Indonesia : Analisa Pemangku Kepentingan (Stakeholder Analysis) Kebijakan Pengembangan Industri Rumah dalam Pembangunan Responsif Gender. Laporan Studi.
- _____.2011. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Center for Policy Reform Indonesia : Naskah Kebijakan Strategi Pembangunan Industri Rumah. Laporan Studi.
- _____.2012. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Center for System: Peran Sektor Ketenagakerjaan Dalam Rangka Mendukung Industri Rumah Melalui Pemberdayaan Perempuan Dalam Sistem Ekonomi Rumah Tangga. Laporan Studi.
- _____.2012. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Center for System : Strategi Kebijakan Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Industri Rumah. Laporan Studi.
- _____.2012. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) IPB : Bantuan Teknis dan Konsultasi untuk Survei Pelaku dan Penyusunan Desain Intervensi Pengembangan Industri Rumah di Kabupaten Kendal. Laporan Studi.
- _____.2012. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Center for System : Evaluasi Pelaksanaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Dan Sejahtera (P2WKSS). Laporan Studi.
- Dewayanti, Ratih dan Erna Ermawati Chotim (2004), "Marginalisasi dan Eksploitasi Perempuan Usaha Mikro di Perdesaan Jawa", Bandung: Yayasan Akatiga.
- East, M. 1980. Home Economics: Past, Present and Future. Allyn & Bacon Inc., Mass., USA.
- Eriyatno dan M. Nadjik. 2012. Solusi Bisnis Untuk Kemiskinan. PT Elex Media Komputindo. Jakarta
- Eriyatno. 2012. Membangun Ekonomi Komparatif: Strategi Meningkatkan Kemakmuran Nusa dan Resiliensi Bangsa. PT Elex Media Komputindo. Jakarta

- Firdausy, Carunia Mulya (1999), "Women Entrepreneurs in SMEs in Indonesia", dalam APEC, "Women Entrepreneurs in SMEs in APC Region", APEC Project on SME, 02/98, Singapura: Sekretariat APEC.
- Gabriel F. 1998. The Role and Contribution of Home Economics to Rational Development. The U. P. Home Economics Journal Vol. 25, 925:33.
- Kantor Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. 2003. Bunga Rampai Lembaga Keuangan Mikro. Business Innovation Center of Indonesia, Bogor.
- Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia. 2008. Modul Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional di Indonesia. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia. 2008. Modul Fasilitator Pelatihan Pengarusutamaan Gender Panduan Bagi Fasilitator. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kusmuljono, B.S. 2009. Menciptakan Kesempatan Rakyat Berusaha: Hybrid Microfinancing. IPB-Press, Bogor.
- Maemunah, May (1996), "Studi tentang kepemimpinan wanita dalam industry rumah tangga di Kabupaten Batanghari, makalah, Maret, Jambi: Fakultas Pendidikan, Universitas Jambi.
- Nguyen, T. P. 2006. The Household Economy and Decentralization of Forest Management in Vietnam. Forest Policy and Economist. Vol. 8, 409:420.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumah Tangga Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Perempuan.
- Priandarini, L. 2007. Panduan Lengkap Memulai dan Mengelola Usaha di Rumah. Jakarta: TransMedia Pustaka.
- Purwandari, Istiti. (2002), "Peranan Industri terhadap kesempatan kerja wanita dan pendapatan rumah tangga", makalah, Januari, Yogyakarta: Fakultas Pertanian STIPER.
- Singh, C.M. 2007. Cottage and Small Scale Industries.
- Sulaiman, Larasati Suliantoro (1982), "Crafts-women: The Social status and economic role of women among low income society", makalah, Jakarta: LP3ES.
- Sulistiawati, Dewi Hariyani. 1996. Home-Based Work as a Rural Survival Strategy in Homeworks in Global Perspective, Boris & Prugl, eds, New York: Routledge

- Suratiah, Ken dkk. 1994. Marginalisasi Pekerja Wanita di Pedesaan: Studi Kasus Industri Rumah Tangga Pangan di Sulawesi Selatan, Yogya: PPK-UGM.
- Tjandraningsih, Indrasari. 1996. Pekerja perempuan di Usaha Kecil: Fenomena Buruh Rumahan dalam Globalisasi. Jurnal Analisis Sosial Edisi 2/ Februari 1996. AKATIGA, Bandung.
- Van der Poel, P. and H. van Dijk. 1987. Household Economy and Tree growing in Upland Central Java. Agroforestry.
- Widagdo, Bambang (2003), "Pola relasi gender dalam keluarga: Studi pada pekerja perempuan sector industri rumah tangga di Kota Blitar", discussion paper, Februari, The study centre for women and society, Universitas Muhammadiyah, Malang.